

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat **Kemen PUPR RI**) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah
- e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 dan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- Direktorat Jenderal Cipta Karya
 1. Sekretariat Direktorat Jenderal
 2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
 3. Direktorat Bina Penataan Bangunan
 4. Direktorat Air Minum
 5. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
 6. Direktorat Sanitasi
 7. Direktorat Prasarana Strategis
 8. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan
 9. Direktorat Kepatuhan Intern

Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, dan bidang lainnya
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan. Pembentukan Balai PPP menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan Ditjen Perumahan guna mendorong program perumahan dan infrastruktur di Indonesia. Fungsi diadakan Balai di setiap kota untuk melaksanakan fasilitasi serah terima asset serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Berikut daftar lokasi dan kepala balai pelaksana penyediaan perumahan:

No Balai	Wilayah Kerja	Kedudukan	Kepala Balai
1. Balai PPP Wilayah Sumatera I	NAD	Banda Aceh	Teuku Faisal Riza
2. Balai PPP Wilayah Sumatera II	Sumatera Utara	Medan	Rusli
3. Balai PPP Wilayah Sumatera III	Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau,	Padang	Zubaidi S.
4. Balai PPP Wilayah Sumatera IV	Bengkulu, Jambi	Jambi	Indra M. Sutan
5. Balai PPP Wilayah Sumatera V	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung	Palembang	A.Darwis
6. Balai PPP Wilayah Jawa I	Banten, DKI Jakarta	Jakarta	Bisma Staniarto
7. Balai PPP Wilayah Jawa II	Jawa Barat	Bandung	Kiagoos Egie Ismail
8. Balai PPP Wilayah Jawa III	Jawa Tengah, DI Yogyakarta	Semarang	Mochamad Mulya Permana
9. Balai PPP Wilayah Jawa IV	Jawa Timur, Bali	Surabaya	Suparman
10. Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara I	Nusa Tenggara Barat	Lombok	Rini Dyah M.
11. Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara II	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Yublina Dila B.
12. Balai PPP Wilayah	Kalimantan Barat,	Pontianak	Andy Suganda

Kalimantan I	Kalimantan Tengah		
13. Balai PPP Wilayah Kalimantan II	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	Samarinda	Nursal
14. Balai PPP Wilayah Sulawesi I	Sulawesi Utara, Gorontalo	Manado	H.Hujurat
15. Balai PPP Wilayah Sulawesi II	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat	Palu	Suko Wiyono
16. Balai PPP Wilayah Sulawesi III	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara	Makasar	Sugiharjo
17. Balai PPP Maluku	Maluku Utara, Maluku	Ambon	Yohanes Y.B.
18. Balai PPP Wilayah Papua I	Papua	Jayapura	Omri Sianturi
19. Balai PPP Wilayah Papua II	Papua Barat	Manokwari	Yance Pabisa

Daftar Lokasi dan Kepala Balai Pelaksana Wilayah I I

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, dibawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung memiliki visi dan misi kantor. Visi dan Misi tersebut berguna untuk mewujudkan impian dan tujuan bersama di sektor – sektor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung adalah terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan kesehatan lingkungan, permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

2.2.2 Misi Perusahaan

Misi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dasar permukiman
2. Mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni
3. Penyediaan prasarana strategis yang handal
4. Mewujudkan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Peningkatan jaringan air limbah (sanitasi)
6. Peningkatan sumber dan pelayanan air bersih
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Perusahaan

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung memiliki bidang usaha atau kegiatan utama perusahaan. Bidang Usaha yang paling di mumpuni adalah kegiatan Prasarana Strategis, untuk kegiatan ini melakukan pembangunan infrastruktur seperti Gedung Pasar contohnya Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, Gedung IAIN Metro, dan Gedung Sekolah Dasar yang ada di kabupaten. Usaha yang lainnya meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun di Kota Bandar Lampung, fungsinya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air

minum bagi masyarakat Bandar Lampung dan peningkatan sanitasi lingkungan, taraf hidup, dan kesehatan masyarakat. Aliran SPAM Bandar Lampung ini akan melayani Kecamatan Rajabasa, Labuhan Ratu, Tanjung Senang, Kedaton, Way Halim, Sukarame, Kedamaian dan Sukabumi. Sanitasi juga kegiatan utama di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, dan PISEW (Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) kegiatan utama yang menguntungkan masyarakat di Provinsi Lampung, melaksanakan infrastruktur untuk permukiman dan pendesaan di wilayah Kabupaten Lampung.

2.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi dari Balai Perusahaan Permukiman Wilayah Lampung terletak di Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung (BPPW Lampung). BPPW Lampung yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No 50 Pecoh Raya Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung terdiri dari dua Ke Struktural dengan satu Kepala Balai terdiri dari Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Untuk Satuan Kerja Balai Permukiman Wilayah Lampung terdiri dari Kepala Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Bendahara, PPSMP, PPK Perencanaan, PPK Tata Laksana, dan PPK Tanggap Darurat. Begitu juga dengan struktur organisasi Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung, terdiri dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung, Bendahara, PPSPM, PPK PKP dan BPB, PPK Sanitasi, PPK Prasarana Strategis, PPK Air Minum.

Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung



Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung 1 1



Struktur Organisasi Satuan Kerja BPPW Lampung 2 1

**Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi Lampung**



Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelaksanaan Prasaran Permukiman Provinsi Lampung 3 1